

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari potensi ekonomi dan karakteristik daerah tersebut. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah semestinya didasarkan pada kekhasan daerah, potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokalitas (Arsyad, 2009:108). Selain mengelola sumberdaya lokal yang ada dan menciptakan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi daerah juga mendirikan institusi-institusi baru, perbaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, dan pembangunan industri kreatif yang merata. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu kerjasama yang baik antara pemerintah daerah serta masyarakat dalam mengelola sumberdaya-sumberdaya lokal dan menentukan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengharuskan pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah. Hal tersebut menjadi landasan bagi pembangunan suatu daerah secara mandiri dengan mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat dan sesuai keinginan mereka secara masif tanpa campur tangan dari pemerintah daerah. Dengan otonomi daerah, akan berdampak positif bagi pembangunan daerah dan kemajuan pembangunan serta memacu pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan ekonomi sekarang lebih ditekankan pada pengembangan sektor ekonomi unggulan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan terkait dengan potensi masyarakat serta sesuai sumberdaya ekonomi lokal. Pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat secara langsung juga akan menambah kebutuhan ekonomi masyarakat, sehingga dibutuhkan peningkatan pendapatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat diperoleh dengan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) (Tambunan, 2001:2).

Provinsi Jawa Timur memiliki peranan dalam pembangunan perekonomian di Pulau Jawa yang cukup tinggi dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Terdapat beberapa kabupaten yang memiliki kontribusi dalam pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur. Salah satu yang menarik adalah Kabupaten Blitar yang berada di posisi tengah dalam kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Blitar memiliki kontribusi sebesar 1,56% pada tahun 2013. Namun pada tahun 2018 kontribusinya turun sebesar 1,55%. Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah otonom yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola, merencanakan dan memanfaatkan potensi ekonomi secara optimal yang bisa dinikmati oleh masyarakatnya. Selama periode tahun 2013-2018 nilai PDRB Kabupaten Blitar mengalami peningkatan diukur berdasarkan atas dasar harga konstan 2010.

**Tabel 1.1**  
**Kontribusi PDRB Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2018 ( % )**

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1.Pertanian, Kehutanan, Perikanan</b>	33,51	32,86	32,54	31,91	31,03	29,87
<b>2.Pertambangan dan Penggalian</b>	4,44	4,38	4,29	4,25	4,27	4,21
<b>3.Industri Pengolahan</b>	12,82	13,05	13,23	13,38	13,56	13,80
<b>4.Pengadaan Listrik dan Gas</b>	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
<b>5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah</b>	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
<b>6.Konstruksi</b>	9,01	9,11	8,99	9,08	9,33	9,54
<b>7.Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil</b>	17,53	17,73	17,95	18,15	18,47	18,83
<b>8.Transportasi dan Pergudangan</b>	1,20	1,22	1,24	1,24	1,28	1,32
<b>9.Peny Akom dan Makan Minum</b>	0,89	0,90	0,91	0,94	0,97	1,01
<b>10.Informasi dan Komunikasi</b>	6,03	6,10	6,18	6,37	6,58	6,80
<b>11.Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	2,25	2,26	2,25	2,27	2,23	2,24
<b>12.Real Estate</b>	1,91	1,94	1,96	1,98	1,97	2,02
<b>13.Jasa Perusahaan</b>	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36
<b>14.Adm. Pemerintah, Pertahanan, &amp; Jaminan Sosial Wajib</b>	3,66	3,49	3,47	3,45	3,35	3,32
<b>15.Jasa Pendidikan</b>	3,99	4,12	4,17	4,19	4,15	4,17
<b>16.Jasa Kesehatan dan Keg. Sosial</b>	0,77	0,83	0,84	0,84	0,84	0,86
<b>17.Jasa Lainnya</b>	1,51	1,51	1,52	1,50	1,50	1,53
<b>Total</b>	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 halaman 2, PDRB Kabupaten Blitar menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 menunjukkan posisi ekonomi Kabupaten Blitar tahun 2013-2018. Sektor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Blitar selama kurun waktu tersebut adalah sektor pertanian. Diketahui bahwa di Kabupaten Blitar terdapat tiga sektor yang memiliki kontribusi tinggi yaitu sektor pertanian; sektor perdagangan besar dan eceran; dan sektor industri pengolahan.

Dalam pembentukan PDRB Kabupaten Blitar sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki kontribusi yang relatif tinggi. Tingginya peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dikarenakan pemanfaatan sumber daya alam yang intensif untuk kegiatan usaha. Melalui upaya diversifikasi dan intensifikasi pertanian memungkinkan berbagai macam komoditas pertanian di Kabupaten Blitar dapat dihasilkan melalui kegiatan usaha tani rakyat baik dari usaha komoditas tanaman musiman maupun komoditas tanaman tahunan dengan volume produksi yang cukup besar. Hal ini memposisikan daerah Kabupaten Blitar sebagai salah satu daerah penuplai bahan baku produk pertanian skala regional maupun nasional.

Hal yang menarik dari data tersebut, antara sektor pertanian dengan sektor perdagangan besar dan eceran yang memiliki kontribusi terbesar. Dari tahun 2013-2018 meskipun sektor pertanian memegang peranan terbesar dalam kontribusi PDRB Kabupaten Blitar, tetapi dalam periode tersebut sektor pertanian mengalami penurunan pertumbuhan yang relatif signifikan. Sedangkan dari sektor perdagangan besar dan eceran terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan pola perubahan kegiatan ekonomi yang memperlihatkan dominasi pertumbuhan sektor-sektor dan kaitannya dengan struktur ekonomi di Provinsi Jawa Timur, sehingga akan memperlihatkan posisi sektor-sektor yang unggul di Kabupaten Blitar. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengidentifikasi sektor unggulan di Kabupaten Blitar dengan judul : “Analisis Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Blitar”.

## 1.2 Kesenjangan Penelitian

Perkembangan ekonomi yang dinamis menyebabkan sektor ekonomi di Kabupaten Blitar mengalami fluktuasi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki kontribusi yang paling tinggi di Kabupaten Blitar. Meskipun begitu dalam kurun waktu 2013-2018 pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan. Sedangkan sektor lain yang cukup tinggi kontribusinya terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan pernyataan diatas penulis mencoba menganalisis perubahan pertumbuhan kontribusi sektoral yang terjadi di Kabupaten Blitar sesuai atau tidak dengan strategi kebijakan pembangunan yang tepat. Mengingat untuk melaksanakan pembangunan dengan sumberdaya yang terbatas sebagai konsekuensinya harus difokuskan pada pembangunan sektor-sektor yang memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang besar bagi sektor-sektor lainnya dan perekonomian secara menyeluruh. Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk menganalisis sektor unggulan Kabupaten Blitar pada tahun 2013-2018.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menentukan sektor unggulan perekonomian wilayah Kabupaten Blitar.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang saling berkaitan. Kelima bab tersebut terdiri dari: (1) pendahuluan; (2) tinjauan pustaka; (3) metode penelitian; (4) hasil dan pembahasan; (5) kesimpulan dan saran.